

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan yang dihadapi dunia berkaitan erat dengan sumber daya keuangan yang tidak mencukupi hingga kemudian berimplikasi pada kondisi-kondisi lainnya seperti kesehatan, pembentukan kelompok kriminal, standar hidup yang rendah, kesulitan ekonomi, dan kebutuhan makanan yang tidak terpenuhi dengan baik (Ho & Iyke, 2018). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), seseorang dikatakan miskin ketika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Pada Maret 2023, garis kemiskinan Indonesia tercatat sebesar Rp550.458 per kapita per bulan. Jumlah tersebut terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp408.522 per kapita per bulan dan Garis Kemiskinan Nonmakanan sebesar Rp141.936 per kapita per bulan.

Fenomena kemiskinan tersebut salah satunya dapat disebabkan oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah (Wibowo, 2016). Lambatnya pertumbuhan ekonomi di sebuah negara atau wilayah akan membuat negara atau wilayah tersebut terjebak dalam kemiskinan (Wibowo, 2016). Masalah ini akan sangat kompleks, belum lagi problematika ketimpangan yang juga ada di wilayah atau negara tersebut (biasanya pada negara-negara berkembang). Ketimpangan yang lebar antara golongan kaya dan miskin juga menjadi masalah serius yang harus dihadapi pemerintah.

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, dan kemiskinan telah dipelajari secara ekstensif oleh para peneliti dan masih menjadi

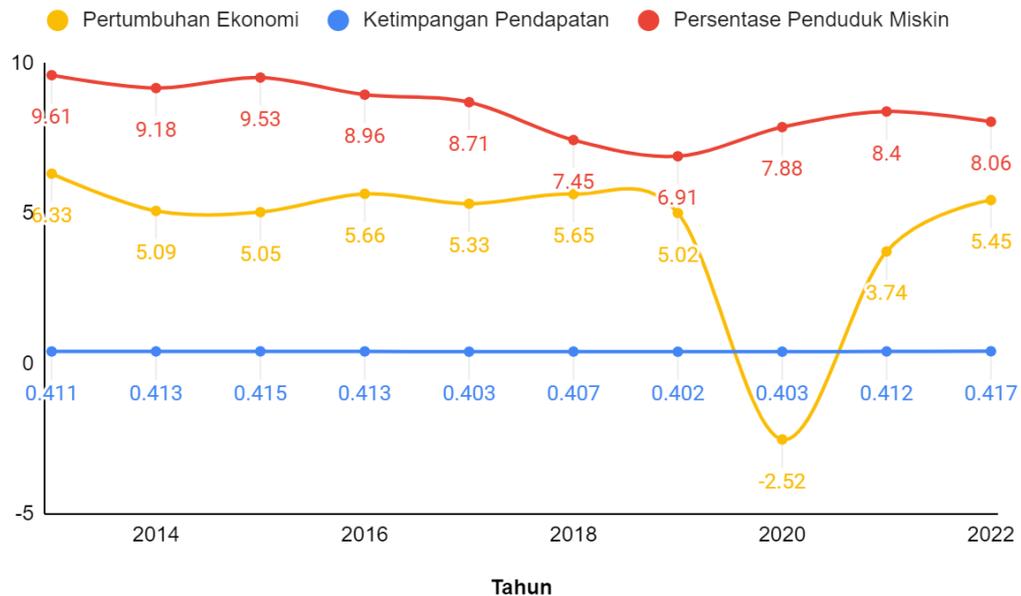
salah satu bidang kajian yang aktif. Ketiga hal tersebut memiliki hubungan yang unik, dinamis, dan kompleks sehingga menjadi fokus tersendiri bagi pemerintah di berbagai negara terutama Negara Sedang Berkembang (NSB). Keseriusan para *policymakers* dalam menangani masalah kemiskinan dan kesejahteraan dibuktikan lewat *Sustainable Development Goals* (SDGs). Tujuan tersebut di antaranya adalah tanpa kemiskinan (SDG 1), tanpa kelaparan (SDG 2), kehidupan sehat dan sejahtera (SDG 3), pendidikan berkualitas (SDG 4), pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (SDG 8), dan berkurangnya kesenjangan (SDG 10).

Kemiskinan merupakan masalah yang tidak sederhana karena mencakup banyak hal. Oleh sebab itu, solusinya tentu saja harus lebih komprehensif. Percepatan penurunan angka kemiskinan di Indonesia telah dilakukan oleh pemerintah. Jika menilik data, kemiskinan yang terjadi di negeri ini selama tahun 2013-2022 mengalami fluktuasi dengan angka yang tidak begitu signifikan. Adapun untuk persentase penduduk miskin, angkanya sempat mengalami kenaikan tinggi karena adanya pandemi *Covid-19* sekitar tahun 2020-2021.

Kemiskinan yang merupakan isu lama terus memiliki pola-pola terbaru yang kemudian menjadi daya tarik untuk diteliti. Uniknya, setiap daerah memiliki pola kemiskinan tertentu sehingga membutuhkan desain kebijakan yang berbeda-beda (Bui et al., 2017). Hal yang sama juga yang terjadi di salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, yaitu Jawa Barat. Provinsi yang tengah konsisten mewujudkan *Smart Province* tersebut memiliki 27 kabupaten/ kota dengan laju pertumbuhan ekonomi yang terus naik. Pada tahun 2022, Jawa Barat masuk dalam jajaran tiga besar penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB). Angka

statistik juga menjelaskan bahwa selama tahun 2013-2022, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat hanya turun di tahun 2020 akibat adanya pandemi *Covid-19*. Namun, kemiskinan juga masih memiliki angka yang cukup tinggi. Meskipun terdapat penurunan, tetapi lajunya sangat lambat. Untuk garis kemiskinan di Jawa Barat, pada Maret 2023 tercatat sebesar Rp495.229 per kapita per bulan. Nominal tersebut terdiri dari Garis Kemisknan Makanan sebesar Rp267.040 dan Garis Kemiskinan Nonmakanan sebesar Rp128.189 per kapita per bulan.

Pada tahun 2022, Jawa Barat menjadi provinsi dengan laju pertumbuhan ekonomi tertinggi di pulau Jawa, yaitu sebesar 5,45%. Angka tersebut didorong oleh pertumbuhan industri pengolahan dan ekspor. Meskipun demikian, bukan berarti angka kemiskinan turun, justru sebaliknya. Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak ke dua di Indonesia. Fakta menarik lainnya, Jawa Barat juga merupakan provinsi dengan realisasi investasi terbanyak, yaitu senilai Rp174,6 triliun. Berikut ditampilkan grafik yang menggambarkan pertumbuhan ekonomi, ketimpangan, dan kemiskinan di provinsi Jawa Barat selama 10 tahun terakhir.



Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan, dan Persentase Penduduk Miskin Jawa Barat Tahun 2013-2022

Sumber: BPS Jawa Barat, 2023

Pembangunan suatu negara atau daerah memiliki beberapa orientasi, yaitu *pro-poor*, *pro-growth*, dan *pro-job*. Jika orientasi pembangunan suatu wilayah bersifat *pro-growth* atau cenderung mengejar angka pertumbuhan ekonomi dengan alasan akan menciptakan lapangan kerja, menaikkan pendapatan, dan lain sebagainya, maka kemiskinan seharusnya memang menurun. Fenomena demikian biasanya terjadi di negara-negara berkembang. Akan tetapi menurut teori *trickle-down effect*, hal yang demikian justru akan memunculkan masalah ketimpangan di dalam masyarakat. Ketika terus dibiarkan, maka hanya masyarakat golongan kaya saja yang akan merasakan manfaat besar pertumbuhan. Sedangkan, masyarakat miskin baru akan merasakannya dalam jangka waktu yang lama dan tentu saja

dengan sedikit manfaat. Meskipun demikian, kondisi disparitas dan kemiskinan akan berkurang dengan sendirinya melalui efek vertikal tersebut.

Berbeda dengan tipe pembangunan *pro-poor*. Dalam konsep pertumbuhan *pro-poor*, pertumbuhan ekonomi harus pula diikuti dengan distribusi pendapatan yang merata guna mempercepat pengentasan kemiskinan (Permadi, 2018). Tidak hanya memerlukan pertumbuhan ekonomi yang pesat, tetapi juga dibutuhkan kualitas pertumbuhan yang baik agar masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan dapat memiliki kesempatan yang sama dalam meningkatkan taraf kesejahteraan hidup mereka masing-masing (Kakwani et al., 2010).

Seyogianya, ketika terdapat kenaikan angka pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah, maka akan terjadi penurunan ketimpangan yang kemudian dapat mereduksi kemiskinan. Akan tetapi, realita yang kita lihat dalam konteks Jawa Barat justru menggambarkan kondisi sebaliknya. Meskipun pertumbuhan ekonomi berada di *level* yang cukup tinggi, tetapi tidak terlihat signifikansi penurunan angka kemiskinan, baik di tingkat kabupaten/ kota maupun tingkat provinsi. Selain itu, penulis juga ingin mengupas permasalahan ini dari perspektif Islam mengingat Jawa Barat merupakan provinsi dengan penduduk Muslim terbanyak di Indonesia. Untuk mendapatkan jawaban dari persoalan tersebut, maka akan dilakukan penelitian secara mendalam dengan judul, **“Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan, dan Kemiskinan: Analisis *Pro-Poor Growth* di Jawa Barat”**.

B. Identifikasi Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah berikut ini:

1. Jawa Barat merupakan provinsi penyumbang PDB Indonesia ke dua terbesar.
2. Ketimpangan pendapatan cenderung stagnan dalam kriteria yang juga tidak rendah.
3. Jawa Barat merupakan provinsi termiskin ke dua di Indonesia.

C. Batasan Masalah

Untuk mencegah meluasnya pembahasan dalam penelitian, maka penulis memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini berfokus pada kondisi Jawa Barat periode 2013-2022.
2. Fokus utama penelitian ini hanya pada penurunan tingkat kemiskinan dan analisis *pro-poor growth* di Jawa Barat selama 10 tahun terakhir.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penting untuk menganalisis sejauh mana pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di Jawa Barat mempengaruhi kemiskinan. Oleh karena itu, masalah-masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini meliputi:

1. Apakah pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Jawa Barat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan?
2. Apakah ketimpangan pendapatan di Jawa Barat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan?

3. Apakah pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat sudah inklusif (*pro-poor growth*)?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah-masalah yang telah dirumuskan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Barat.
2. Menganalisis pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Barat.
3. Menganalisis sejauh mana inklusivitas pertumbuhan ekonomi (*pro-poor growth*) yang terjadi di Jawa Barat.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan teridentifikasinya keterkaitan di antara pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, dan kemiskinan di Jawa Barat selama tahun 2013-2022, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan:

1. Manfaat Teoritis

Berkontribusi dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, terutama pada ranah kajian mengenai pertumbuhan ekonomi inklusif dan *pro-poor growth* di Jawa Barat.

2. Manfaat Praktis

Berkontribusi sebagai bahan pertimbangan untuk pemerintah sebagai *policymakers* dalam menyusun kebijakan agar lebih efektif dan tepat sasaran.

G. Sistematika Penulisan

Laporan penelitian ini akan terbagi menjadi lima bab. Penjelasannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan menguraikan landasan teori mengenai pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan, dan kemiskinan. Selain itu, bab ini juga akan memperlihatkan hasil penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan tentang jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan hasil analisis dari rumusan-rumusan masalah yang telah dibuat. Bab ini juga akan menguraikan analisis

pembahasan mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan terhadap kemiskinan di Jawa Barat periode 2013-2022.

BAB V PENUTUP

Bab penutup akan menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian. Pada bab ini juga akan diuraikan terkait rekomendasi kebijakan yang diusulkan dan keterbatasan penelitian.

